



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**68 Desa Diduga Selewengkan DD**

**16 Desa Berpeluang Tersandung Hukum**

**SELUMA** - Setidaknya ada 68 desa tersandung perkara realisasi Dana Desa (DD). Sebanyak 16 diantaranya berpotensi terjatuh hukum atas sangkaan melakukan korupsi DD. Hal ini disampaikan Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Seluma, Mirin Ajib, SH, MH saat membuka rapat koordinasi (rakor) pendamping desa, kemarin (4/4).

Dijelaskan Mirin, 68 desa yang bermasalah terhadap realisasi DD ini terjadi di tahun 2018 yang laporannya akan diproses tahun 2019. Diharap-

kannya realisasi DD tahun 2019 ini tidak ada lagi pelanggaran ataupun penyimpangan.

"Tidak perlu saya sebutkan desa mana saja. Namun saya harap ini menjadi pelajaran bagi kades agar dalam realisasi DD tahun 2019 lebih fokus dalam merealisasikan semua dana desa yang telah dialokasikan tersebut," tandas Mirin.

Untuk 16 desa yang berpotensi terjatuh hukum lanjut Mirin, saat ini tengah dilakukan audit khusus oleh Inspektorat Seluma. Pelanggaran yang dilakukan menyangkut realisasi DD yang tidak sesuai dengan realisasi fisik yang dibangun. Sehingga menjadi temuan saat dilakukan audit oleh Ins-

pektorat Seluma.

"Oleh karena itu saya harapkan dengan adanya pendamping desa ini dapat memberikan kontribusi bagi desa dalam merealisasikan DD. Ke depan tidak ada lagi desa yang tersandung perkara DD. Semua dana desa dapat terserap sesuai yang telah direncanakan," ujarnya.

Di tahun 2019 ini telah disiapkan anggaran dana desa Rp 53 miliar oleh pemerintah pusat. Anggaran yang gelontorkan pemerintah tersebut fokus untuk pembangunan infrastruktur desa guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

"Besaran DD yang diterima tiap desa bervariasi, sesuai dengan kon-

disi dan keadaan desa. Khusus desa pedalaman akan menerima DD lebih besar," kata Mirin.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Saparudin, S.Pd mengatakan terus memberikan terobosan bagi desa dalam realisasi DD agar lebih transparan. Salah satunya mencantumkan RAPB-Des di baliho agar masyarakat mengetahui rencana realisasi DD.

"Baliho tersebut dipasang di kantor desa agar semua mengetahui sehingga secara tidak langsung masyarakat ikut dilibatkan dalam pengawasan realisasi DD ini," demikian Saparudin. (aba)